

SISTEM PENGETAHUAN LOKAL DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Imanta Immanuel Perangin-Angin¹

¹⁾ Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto – Penfui Kode Pos. 85114, Telp. 0380-881597
Email: imanta.perangin.angin@staf.undana.ac.id

Abstrak

Pembangunan yang dilaksanakan oleh hampir semua negara telah menjadi kekuatan global yang hampir tidak dapat dibendung, terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan negara, terlebih lagi untuk berjalannya roda pemerintahan suatu negara. Namun kemudian disadari bahwa pembangunan itu juga menjadi sumber ancaman bagi kerusakan bumi dan bencana lingkungan. Hal inilah yang kemudian menjadi pencetus bahwa dibutuhkan suatu pembangunan yang sifatnya berkelanjutan yang tentu saja didalamnya melibatkan masyarakat lokal. Sistem pengetahuan lokal yang ada diharapkan mampu menjadi sebuah pengetahuan mengenai model pembangunan yang akan diterapkan sehingga nantinya masyarakat lokal tersebut terlibat di dalam prosesnya, mulai dari perencanaan, pengadaan modal komunal dan sharing manfaat dari sebuah kegiatan pembangunan berkelanjutan

Kata Kunci : Pembangunan berkelanjutan, sistem pengetahuan lokal

LOCAL KNOWLEDGE SYSTEMS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Abstract

The development carried out by almost all countries has become a global force that is almost unstoppable, especially in efforts to increase people's welfare and increase state revenues, especially for the running of a country's government. But then it was realized that the development was also a source of threats to damage to the earth and environmental disasters. This is what later became the originator that needed a development that is sustainable in nature which of course involves the local community. The existing local knowledge system is expected to be able to become a knowledge of the development model that will be applied so that later the local community is involved in the process, starting from planning, procuring communal capital and sharing benefits from a sustainable development activity.

Keywords : Sustainable development, local knowledge system

Korespondensi: Imanta I. Perangin Angin, S.Sos, MSP, Program Studi Sosiologi, FISIP
Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto Penfui – Kupang, Email:
imanta.perangin.angin@staf.undana.ac.id

Pendahuluan

Lingkungan yang baik dan lestari, sampai hari ini menjadi cita-cita semua negara. Seiring ancaman bencana lingkungan yang bisa terjadi kapan saja, Ancaman ini dapat terjadi di seluruh belahan bumi. Potensi ancaman ini kemudian membuka mata parapengambil kebijakan, dimana timbulkesadaran mereka bahwa instrument utama terjadinya perubahan lingkungan adalah pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan oleh hampir semua negara telah menjadi kekuatan global yang hampir tidak dapat dibendung, terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan negara, terlebih lagi untuk berjalannya roda pemerintahan suatu negara

Pada umumnya pembangunan ekonomi menjadi suatu control yang kuat bagi terjadinya perubahan lingkungan. Capaian-capaian materiil yang menjadi tujuan pembangunan ekonomi dipandang sebagai factor utama terjadinya perubahan lingkungan. Pencapaian materiil tersebut menjadi keberhasilan dalam ukuran nilai ekonomi sedangkan perubahan lingkungan tidak dilihat sebagai sebuah dampak, walaupun terjadi kerusakan lingkungan. Kondisi ini memunculkan pemahaman bahwa terjadi etos pembangunan yang tidak berpihak kepada lingkungan. Lingkungan di korbankan untuk tercapainya tujuan pembangunan terutama pembangunan ekonomi.

Kesadaran manusia terhadap praktek pembangunan yang tidak berpihak pada lingkungan dimulai pada saat dilangsungkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi Tentang Lingkungan dan Pembangunan (the United Nation Conference on Environmental and Development) tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Hasil dari KTT Rio kemudian dilanjutkan dengan KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2002.

Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development) muncul sebagai kesadaran dari komunitas global dengan tujuan membatasi atau mengontrol kerusakan lingkungan atau bumi sebagai akibat pelaksanaan pembangunan. Hampir seluruh peserta KTT Johannesburg bersepakat bahwa praktek pembangunan yang selama ini dilaksanakan harus dikoreksi. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sebagai akibat pembangunan harus disikapi dengan program yang pro pada lingkungan. Pemahaman dari pembangunan berkelanjutan (sustainable development) itu sendiri adalah aksi pembangunan

yang menunjang tinggi interaksi harmonis antara system biologis dan sumber daya, system ekonomi dan system social (Stren, 1992).

Dalam upaya berlangsungnya pembangunan berkelanjutan secara baik (Budihardjo dan Sujarto, 2005:18) menyatakan setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu :

- Adanya prinsip keterkaitan, dimana system lingkungan alami yang memuat jaringan kehidupan (web of life) yang mempertautkan keseluruhan makhluk alami dalam hubungan keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Selain itu juga memuat keterkaitan antara lingkungan ekonomi dan lingkungan social yang didalamnya terdapat hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya.
- Prinsip Keanekaragaman, dimana tercipta kenaneka ragam jaringan kehidupan alami, semakin banyak keterkaitan antar komponen yang ada maka diharapkan semakin kuat dan semakin kokoh ikatan tersebut. Ikatan inilah yang kemudian kita kenal sebagai ecological system atau ekosistem. Prinsip ini juga harus diberlakukan kepada konteks pengelolaan lingkungan, dimana terjadi keterlibatan antara dimensi social dan politik yang beragam. Yang menjadi penekanan disini adalah bahwasanya bukan semata prinsip ekonomi yang diberlakukan secara homogen dalam pelaksanaan pembangunan, namun harus melibatkan dimensi social dan lingkungan sebagai parameter pembangunan dan tujuan pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Hal inilah yang disebut dengan prinsip keterkaitan.
- Prinsip Kegunaan, yaitu semua elemen dalam sebuah ekosistem harus memiliki kegunaan dalam berfungsi. Saat kita berbicara tentang sebuah ekosistem maka pada hakekatnya tidak ada yang tidak berguna atau tidak berfungsi pada ekosistem tersebut. Pelibatan jaringan social-politik ekonomi dan lingkungan kesuanya memiliki manfaat. Pada tataran implementasinya, social-politik, ekonomi dan lingkungan akan saling menguatkan dalam pembuatan kebijakan dan pengawasannya.
- Prinsip Harmoni, yaitu setiap elemen harus terangkai atau tertaut secara harmoni, tidak ada yang mendominasi atau ter subordinasi dalam sistem tersebut. Manusia harus mempelajari prinsip harmoni tersebut, agar dalam pelaksanaan pembangunan manusia mampu menjaga keharmonisan antara

systemekonomi, social dan lingkungan.

- Prinsip Keberlanjutan, yaitu lingkungan fisik akan memiliki sumber daya alam renewable resources yang mampu memperbaharui dirinya. Dalam hal ini kemampuan renewable resources itu dimiliki oleh flora dan fauna. Namun ada syarat yang harus dipenuhi agar kemampuan itu terjaga dengan baik, yaitu pengelolaan lingkungan hidup setidaknya tidak melampaui kemampuan renewable resources dari flora dan fauna yang ada di lokasi pelaksanaan pembangunan tersebut. Dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, ternyata dibutuhkan keterlibatan banyak pihak, seperti pemerintah, pengusaha dan masyarakat madani (Salim, 2010:167). Namun pada kenyataannya kita menemukan bahwa peran masyarakat local belum teralokasi dengan baik, hal inilah yang menjadi kelemahan sehingga pencapaian pembangunan berkelanjutan itu tidak maksimal walau belum disebut gagal.

Permasalahan

Pembangunan berkelanjutan pada hakekatnya adalah sebuah kegiatan yang menggunakan sumber daya alam guna pemenuhan kebutuhan manusia pada saat ini dan dimasa yang akan datang. Agar kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan baik maka diharapkan keterlibatan berbagai pihak dengan memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan yang telah disebutkan diatas.

Jika kita melihat pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan, maka kita melihat bahwanya pembangunan tersebut lebih menekankan pada nilai-nilai modern, kondisi ini menyebabkan terjadinya perubahan social yang tidak merata pada penduduk Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan pelibatan masyarakat local, yang dalam hal ini adalah pelibatan system pengetahuan local.

Pembahasan.

1. Pentingnya Memasukkan Sistem Pengetahuan Lokal pada Pembangunan Berkelanjutan

Pada saat ini, implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia bisa dikatakan belum berhasil. Ide besar untuk mensejahterakan masyarakat pada saat ini dan yang akan datang dengan mewariskan lingkungan yang baik kepada anak-

cucu masih berupa jargon semata. Jangan wariskan air mata kepada anak-cucu tetapi wariskanlah mata air juga menjadi kecap yang acap kita dengar dalam implementasi pembangunan. Namun padakenyataannya kita melihat banyak terjadi degradasi lingkungan sebagai dampak dari pembangunan. Kerusakan lingkungan itu tidak hanya terjadi di perkotaan saja bahkan sampai di wilayah pedesaan juga.

Komitmen dari implementasi pembangunan yang sedang berjalan juga cenderung tidak menyentuh masyarakat kelas bawah. Kondisi tereksklusi dari implementasi pembangunan tetap mereka alami. Masyarakat kelas bawah senantiasa tidak tersentuh pembangunan, setidaknya hanya menjadi objek pasif dari relasi negara dan pemilik modal. Bahkan dalam kondisi terburuk, tergesurnya masyarakat dari “tanah”nya sendiri juga menjadi bentuk lain dari dampak yang timbul akibat implementasi pembangunan.

Mengapa kondisi tersebut bisa terjadi? Setidaknya kita dapat membuat sebuah beberapa point analisa yaitu :

- Penerapan pembangunan berkelanjutan dipahami secara global tanpa melihat kondisi yang terjadi dimana kegiatan pembangunan itu dilaksanakan. Implikasinya adalah bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak menyentuh pada permasalahan local secara mendetail.
- Pembangunan berkelanjutan dipahami sebagai sebuah model pembangunan alternative, yang dipahami sebagai antithesis dari Pembangunan ekonomi konvensional. Hal ini menyebabkan model Pembangunan berkelanjutan tersebut tidak pernah dijelaskan secara rinci dan diuji secara seksama oleh banyak kelompok masyarakat, khususnya masyarakat yang akan bersentuhan langsung dengan proses pembangunan berkelanjutan tersebut.

Mengutip salah satu prinsip hasil KTT Rio 1992, yang menyatakan peran penting masyarakat local (penduduk asli) dan komunitas mereka dalam pembangunan berkelanjutan..... *indigenous people and their communities, and other local communities, have a vital role in environmental management and development because their knowledge and traditional practices. State should*

recognize and duly support their identity, cultures and interest and enable their effective participation in the achievement of the sustainable development

... penduduk asli dan komunitas mereka, dan komunitas local lain, berperan penting dalam pembangunan dan manajemen lingkungan karena pengetahuan dan praktek tradisional mereka. Negara harus mengenalkan dan sepatutnya, mendukung kepentingan, kebudayaan dan identitas mereka dan memungkinkan partisipasi efektif mereka dalam upaya pembangunan berkelanjutan.

Dari kutipan diatas, kita memahami bahwa terjadi perkembangan yang cukup bagus dalam upaya pengawasan dan pemeliharaan lingkungan. Ilmu pengetahuan modern dan system pengetahuan local masyarakat dilibatkan dalam proses tersebut. Ilmu pengetahuan modern tidak menjadi satu-satunya pengetahuan untuk menjawab dan memecahkan semua permasalahan, terutama pada masalah lingkungan.

Pada konteks keberlanjutan (*sustainability*), system pengetahuan local mendapat tempat tersendiri Hal ini disebabkan karena system pengetahuan local yang ada pada masyarakat tersebut sebenarnya merupakan buah dari proses relasi mereka dengan lingkungannya yang kemudian dijadikan tradisi dan diwariskan secara turun-temurun menjadi budaya bersama. Budaya dan pengetahuan tersebut mereka yakini sebagai nilai yang harus dilaksanakan sebagai upaya memelihara keberlangsungan alam

Namun pada kenyataannya, proses pembangunan yang berlangsung kurang memberikan ruang kepada kekayaan-kekayaan social dan pengetahuan local masyarakat setempat. Tidak heran jika kita melihat pembangunan lingkungan hanya berupa jargon semata. Masyarakat bawah tidak tersentuh pembangunan tersebut karena tidak memahami arah dan tujuan pembangunan tersebut. Partisipasi yang mereka lakukan masih sangat rendah, biasanya juga partisipasi yang terjadi akibat mobilisasi dari pemerintah saja.

Kebijakan yang sifatnya *top-down* bisa dikatakan menjadi akar dari permasalahan tersebut. Pembangunan yang berkelanjutan ternyata masih berupa inisiatif yang datang dari pemerintah. Masyarakat local tidak diberikan ruang dalam memahami permasalahan yang ada dan kemudian tidak diberikan ruang

juga dalam merumuskan pemecahan masalah yang mereka hadapi. Problem solving yang datang dari pemerintah yang sifatnya top-down juga kemudian tidak menggali kekayaan local masyarakat sehingga pembangunan yang dilaksanakan kemudian tidak menyentuh problem mendasar masyarakat. Tanpa menyentuh aspek nilai social dan system pengetahuan yang berkembang luas di dalam masyarakat maka pembangunan tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

Negara “terbelakang” hendaknya jangan mencari citra masa depannya pada negara “maju”, tetapi dalam ekologi dan kebudayaannya sendiri. Pembangunan tidak memiliki makna universal. Tidak ada pembangunan pada dirinya sendiri, melainkan hanya pembangunan sesuatu, yang dalam kasus ini adalah kawasan ekologi tertentu (Hettne, 2003:335)

Berdasarkan kutipan diatas, yang harus dipahami adalah bagaimana merumuskan konsep pembangunan berkelanjutan dengan basis system pengetahuan local yang ada pada komunitas tertentu.

Durning dalam Mitchel, B Setiawan dan Dwita (2000:299) menyatakan bahwa Pengetahuan local yang dimaksud adalah system pengetahuan yang berkembang pada komunitas tertentu yang bisa dikategorikan sebagai masyarakat asli yang local dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- Keturunan penduduk asli suatu daerah yang kemudian dihuni oleh sekelompok masyarakat dari luar dan lebih kuat
- Sekelompok rang yang memiliki tradisi bahasa, budaya dan agama yang berbeda dengan kelompok dominan
- Selalu diasosiasikan dengan beberapa tipe kondisi ekonomi masyarakat
- Keturunan masyarakat pemburu, nomadic dan peladang berpindah
- Masyarakat dengan hubungan social yang menekankan pada kelompok, pengambilan keputusan melalui kesepakatan, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelompok

2. Pembangunan Berkelanjutan dengan Memperkuat Nilai-nilai Lokal

Hampir setiap suku bangsa di Inonesia memiliki kearifan local, pada saat ini banyak kearifan local tersebut hilang atau setidaknya tidak lagi menjadi jati diri suku bangsa tertentu. Karena itu sudah saatnya dilaksanakan inventarisasi

dari suku bangsa yang ada di Indonesia. Langkah ini mendesak agar pembangunan berkelanjutan itu juga mengadopsi system pengetahuan local yang ada di masyarakat. Diharapkan pada akhirnya tujuan pembangunan dapat tercapai.

Dalam upaya penguatan nilai local, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan, yaitu :

a. Pengakuan Sistem Pengetahuan Lokal sebagai Hukum yang Sejajar dengan Hukum Nasional

Selama ini hukum adat tidak diakui sebagai hukum yang berlaku ditengah kehidupan masyarakat. Hampir semua elemen kehidupan masyarakat diatur oleh Hukum Positif sebagai hukum yang hidup dan berlaku untuk seluruh masyarakat. Salah satu contohnya adalah tentang hak kepemilikan. Pada saat ini, hak kepemilikan adat juga telah dikalahkan oleh hak kepemilikan yang diatur oleh hukum positif.

Konsekwensinya adalah ketika terjadi proses pembangunan yang dalam kegiatannya mengadakan eksploitasi terhadap sumber daya alam, maka para pemilik modal hanya berurusan dengan negara dengan pendekatan hukum positif. Sedangkan masyarakat yang selama ini mendiami area tersebut hanya bisa tunduk terhadap peraturan pemerintah dan menerima segala bentuk akibat dari proses pembangunan tersebut.

Padahal, selama ini masyarakat setempat selama ini hidupnya telah menyatu dengan alam dan lingkungan tersebut. Sehingga ketika area tersebut sudah menjadi lokasi pembangunan dan berada pada kekuasaan pihak-pihak tertentu, maka ketika masyarakat setempat ingin melakukan kebiasaan mereka pada area tersebut akan dianggap melanggar undang-undang.

Sudah saatnya pengelolaan berbasis komunitas diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini menjadi komunitas yang mendiami kawasan tersebut. Namun ada yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan berbasis komunitas ini, yaitu kelemahan berupa ketidakjelasan terhadap Hak. Hak yang dimaksud disini adalah sebuah penguasaan atas wilayah tertentu oleh negara, pemodal dan masyarakat.

Sebagai contoh pada pengelolaan sumber daya air. Dimana selama ini berlaku *private property, collective property dan public property*. Dari ketiga konsep

penguasaan wilayah tersebut, kita dapat memastikan bahwa ada area yang dikuasai pihak tertentu dan mendapat legitimasi dari pemerintah. Kelemahan lain yang sering timbul adalah ketidakberdayaan komunitas atas penetrasi pemerintah dan pemilik modal yang diakibatkan oleh rendahnya sumber daya manusia di tingkat local. (Sitana dan Eman, 2008:240).

Menilik dari uraian diatas maka kelemahan-kelemahan tersebut harus menjadi perhatian dan sesegera mungkin dapat diatasi agar pengesahan hak-hak adat jugakemudian diimbangi dengan kesiapan komunitas pada pengelolaan di tingkat local.

b. Pembangunan yang Benar-benar untuk Kepentingan Masyarakat

Dalam upaya percepatan pembangunan berkelanjutan, system pengetahuan local tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan proses pemberdayaan (empowerment) kepada masyarakat sebab mereka lah yang sebenarnya menjadi objek dari pembangunan tersebut. Ketika pembangunan dilaksanakan maka masyarakatlah yang pertama sekali menikmati hasil dari proses pembangunan itu. Sedangkan apabila terjadi kerusakan lingkungan akibat pembangunan tersebut, maka masyarakat jugalah yang akan menikmati bencana lingkungan dan menanggung akibatnya.

Proses pemberdayaan masyarakat diharapkan menciptakan masyarakat yang mampu sebagai motor penggerak dalam system pengetahuan local mereka sendiri. Dari upaya yang mereka lakukan secara bersama-sama dan diwariskan turun temurun maka akan tercipta sebuah modal social yang kuat dan mampu menjadi sebuah kekuatan masyarakat tersebut untuk mengembangkan diri dan kelompoknya.

Setidaknya pada masyarakat tersebut terdapat aturan-aturan kolektif dan system pengendalian social yang menjadi potensi mereka selanjutnya.

c. Partisipasi Sebagai Ujung Tombak Pembangunan

Pada setiap tahapan pembangunan berkelanjutan dengan memberdayakan system pengetahuan local, Masyarakat diharapkan mampu terlibat secara penuh. Keterlibatan masyarakat inilah yang kemudian kita kenal sebagai partisipasi yang pada prinsipnya menjadi syarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut.

White dalam Sastropoetro (1998:57) menjelaskan bahwa Pelaksanaan partisipasi pada hakikatnya menekankan pada 3 dimensi pokok, yaitu :

1. Semua orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya
2. Sumbangan untuk pembangunan, dan biasanya bersifat massal. Hal ini merupakan proses pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil.
3. Turut menikmati , berupa sharing terhadap keuntungan yang telah diperoleh dari pelaksanaan program

Dalam proses pembangunan, pemerintah hendaknya melibatkan komunitas lokal, keterlibatan yang dimaksud disini adalah memberi ruang yang cukup untuk terlibat dalam perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Ketika masyarakat lokal terlibat dalam kegiatan perencanaan maka diharapkan program pembangunan yang akan dilaksanakan tentunya mengakomodir kebutuhan mereka. Selanjutnya adalah bagaimana masyarakat lokal tersebut difasilitasi dan dimampukan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Perencanaan pembangunan yang bersifat *top-down* tentunya akan membatasi partisipasi masyarakat lokal, pemerintah cenderung melakukan mobilisasi masyarakat dengan program pembangunan yang telah disiapkan.

d. Memperhatikan Kepentingan dan partisipasi Kelompok yang Tereksklusi.

Hampir di setiap wilayah Indonesia, kita dapat menemukan kelompok masyarakat tereksklusi, yaitu kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan jauh dari menikmati sumber daya. Dalam hal partisipasi, kelompok ini juga jauh dari kegiatan tersebut. Mulai dari proses pengambilan keputusan, sumbangan dan sampai kepada sharing manfaat, kelompok yang tereksklusif ini kerap ditemukan.

Jika dalam proses pembangunan, pada awalnya semua warga dirumuskan sebagai penerima manfaat, namun saat ini semua warga masyarakat bukan saja sebagai penerima manfaat dari proses pembangunan itu. Namun mereka juga menjadi berhak dan sah atas pembangunan. Berhak dan sah yang dimaksud adalah keterlibatan mereka sebagai bagian dari perencanaan sampai kepada sharing manfaat.

Cara untuk mangakomodir kelompok tereksklusif ini pada prinsipnya adalah dengan memberikan 3 aspek utama bagi masyarakat (Gaventa, Vol 33 No 2, Institute of Developmen Studies, University of Susses) yaitu :

1. Inclusive Right untuk semua orang
2. Hak untuk berpartisipasi
3. Menugaskan negara untuk melindungi dan merealisasikan hak-hak tersebut

Kesimpulan

Konsep Pembangunan Berkelanjutan merupakan konsep yang dinamis. Konsep utama yang ada merupakan konsep baku yang apabila diaplikasikan akan membutuhkan penyesuaian terhadap beberapa aspek, diantaranya wilayah atau lokasi dilaksanakannya proses pembangunan, kondisi social ekonomi dan politik dari masyarakat dan kemampuan negara sebagai pihak yang bertanggung-jawab terhadap proses pembangunan yang dilaksanakan. Namun, dengan adanya kesadaran untuk menjaga bumi dari kerusakan dan penyelamatan lingkungan adalah poin utama yang harus dicapai dari proses pembangunan berkelanjutan.

Di Indonesia, upaya pembangunan berkelanjutan tidak bisa lepas dari system pengetahuan lokal masyarakat. Namun kurangnya pengintegrasian kedua unsur tersebut menimbulkan permasalahan dan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Model perencanaan yang Top-Down membuat masyarakat menjadi terasing dengan pembangunan yang ada. Sehingga pada akhirnya masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut.

Yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita mampu menggali system pengetahuan lokal yang ada dan kemudian merumuskan pembangunan berkelanjutan dengan nilai pengetahuan lokal tersebut.

Daftar Pustaka

- Budihardjo, Eko dan Djoko Sujarto, 2005, Kota Berkelanjutan, Bandung, Alumni
- Falz, Richard C, Frederick M.Denny, dan Azizan Baharuddin (ed), 2003, Islam dan Ecology, A Bestowed Trust, Harvard University Press
- Hetnee, Bjorn, 2003, Teori Pembangunan dan Tiga Dunia, Jakarta, Pt Gramedia PustakaUtama
- Khor, Martin, 2002, Globalisasi dan Krisis Pembangunan Berkelanjutan, CindelasPustaka Cerdas
- Baiquni, M dan Susilawardhani, 2002, Pembangunan yang idak Berkelanjutan, Yogyakarta, Transmdia Global Wacana
- Mitchell, BruceB Setiawan, Dwita hadi Rahmi. 2000, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Salim, Emil, 2005, Membangu Keberlanjutan Pembangunan, PidatoPenerima nugerahHamengkobuwono IX, 2003, 20 Desember 2003
- _____ , 2010, Ratusan Bunga Merusak Satu Bumi, Jakarta, Penerbit Buku Kompas
- Sastropoetro, R.A. Santoso, 1998, Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan DisiplinDalam Pembangunan Nasional, Bandung, Penerbit Alumni
- Sunaryo, Waluyo dkk, 2007, Pengelolaan Sumber Daya Air, Malang Bayu Media Publishing
- Sutaryono, 2008, Pemberdayaan Setengah Hati, Sub Ordinasi Masyarakat Lokal dalamPengelolaan Hutan, Yogyakarta, Lapn Pustaka Utama dan STPN
- Tjikrowiyono, Moeljarto,1996, Pembangunan; Dilema dan Tantangan, Ypgyakarta Pustaka Pelajar
- Zubaeli, 2007, Wacana Pembangunan Alternatif, Ragam Perpektif Pengembangan danPemberdayaan MAsyarakat, Yogyakarta, Ar Ruzz Medi